



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA PANSUS RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari, Tanggal	: Rabu, 02 Juni 2021
Waktu	: Pukul 10.40 WIB – 11.25 WIB
Sifat	: Tertutup
Tempat	: Ruang Rapat Komisi Pansus B
Ketua Rapat	: Komarudin Watubun, S.H., M.H. (Ketua Pansus /F-PDIP)
Acara	: Penjelasan terkait kebijakan dan perkembangan tingkat pendidikan dan kesehatan di Tanah Papua dalam pelaksanaan Dana Otonomi Khusus
Sekretaris Rapat	: Endah Sri Lestari, S.H., M.Si (Kepala Bagian Sekretariat Pansus)
Hadir	: Pimpinan: 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H. 2. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si. 3. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. (I) 4. Marthen Douw (I)
	: Anggota: Fraksi PDI Perjuangan 5. Jimmy Demianus Ijie, S.H. (I) 6. Drs. H. Mohammad Idham Samawi (I) 7. My Esti Wijayati (I) 8. Darmadi Duriyanto (I) 9. Masinton Pasaribu, S.H. (I) 10. Putra Nababan
	: Fraksi Partai GOLKAR 11. Lodewijk F. Paulus (I) 12. IR. Hanan A. Rozak, M.S. (I) 13. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. 14. Trifena M. Tinal, B.Sc. (I)

Yp
-

Fraksi Partai GERINDRA

15. Habiburokhman, S.H., M.H. (I)
16. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum. (I)
17. DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.

Fraksi Partai NASDEM

18. Roberth Rouw (I)
19. H. Sulaeman L. Hamzah
20. Rico Sia (I)

Fraksi PKB

21. H. Yanuar Prihatin (I)
22. Heru Widodo, S.Psi. (I)

Fraksi Partai DEMOKRAT

23. Anwar Hafid (I)
24. Willem Wandik, S.Sos. (I)
25. Hj. Vera Febyanthy, M.Si. (I)

Fraksi PKS

26. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M. (I)
27. H. Rofik Hananto, S.E. (I)
28. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

Fraksi PAN

29. H. Nazaruddin Dek Gam, S.H. (I)
30. Drs. Guspari Gaus, M.Si.

Fraksi PPP

31. Hj. Nurhayati (I)

Undangan

- : 1. Pemerintah
- a. Dirjen Pendidikan Anak USia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Jumeri, S.TP., M.Si.)
 - b. Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan (dr. Kirana Pritasari, MQIH)



(RAPAT DIMULAI PUKUL : 10.40 WIB)

KETUA RAPAT (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebelum saya memulai rapat pada pagi hari ini saya ajukan pertanyaan dulu pada Pak Dirjen dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Pendidikan. Yang kita undang Pak Menteri, jadi yang mewakili Pak Dirjen. Pertanyaan saya Bapak sudah diberi kewenangan full untuk menjawab atas nama Pak Menteri, jadi apa yang karena ini ada tiga hal pokok ya dalam Otsus Papua ini, ini soal Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat. Nah apalagi ini undang-undang ini Hak Inisiatif Pemerintah, oleh karena itu kita harap kehadiran di sini mestinya menteri karena menyangkut kebijakan. Oleh karena itu saya sampaikan pertanyaan ini dulu, kalau Bapak bisa menjawab menyampaikan itu pada tataran kebijakan ya, saya serahkan anggota untuk menilai apa perlu dilanjutkan untuk rapat atau tidak. Itu satu.

Yang kedua Menteri Kesehatan juga ada wakil, PH, Kepala BPPSDMK, para pejabat yang hadir ini kira-kira bisa melayani rapat ini, kemudian pada tataran kebijakan atau misalnya masuk hal-hal teknis kita bicara undang-undang kan bisa ambil kebijakan, apalagi ini undang-undang diajukan atas Hak Inisiatif Pemerintah, mestinya harus Tim Pemerintah all out juga jadi itu pertanyaan saya.

Silakan.

KEMENTERIAN DIKBUDRISTEK (JUMERI, S.TP., M. Si.):

Terima kasih Pak.

Saya Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek hari ini hadir bersama semua sekretaris Direktorat Jenderal yang terkait dengan Paudasmen, Vokasi, Dikti, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum. Jadi kami tim yang lengkap sudah diberi mandat semua Pak Menteri untuk bisa hadir di rapat ini Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, selanjutnya Kementerian Kesehatan.



KEMENTERIAN KESEHATAN (dr. KIRANA PRITASARI, MQIH):

Terima kasih Pimpinan.

Kami juga telah mendapatkan tugas dari bapak Menteri Kesehatan untuk hadir di dalam forum Pansus ini, untuk menjelaskan mengenai kebijakan dan perkembangan kesehatan di tanah Papua. Terkait dengan pembahasan RUU Otsus ini. Kami hadir dengan tim juga dihadiri dari Biro Perencanaan dan Biro Hukum, dan Unit Eselon I yang lain.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada anggota Pansus baik di virtual maupun hadir secara fisik untuk memberi penilaian apakah kita lanjut rapat ini, kalau kita lanjut saya buka.

WAKIL KETUA (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.SI.):

Ketua izin bicara Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Agung.

WAKIL KETUA (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.SI.):

Sebelum teman-teman Pansus yang hadir atau yang virtual.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Di meja kami memang telah menerima surat pemberitahuan resmi, konfirmasi mengenai undangan rapat kerja. Yang pertama nomor tercantum kemudian alasan ketidakhadirannya hanya menyebutkan alasan ketidakhadiran dan mewakilkan kepada Pak Kepala Badan BPPSDM, tidak disebutkan alasan ketidakhadirannya.

Untuk yang dari Kementerian Pendidikan di sini ada konfirmasi Mas Menteri tidak bisa hadir karena harus menghadiri agenda lain. Terhadap surat ini yang dimaksudkan oleh Ketua Pansus adalah untuk mempertegas kembali, seperti halnya Republik Indonesia punya duta besar, dengan predikat berkuasa penuh kan begitu. Bahwa perwakilan dari Republik Indonesia di luar negeri dengan mandat dan kuasa penuh, bukan dengan mandat dan kuasa untuk sewenang-wenang, bukan itu.



Nah dalam konteks ini kami ingin menanyakan apabila ada hal-hal yang bersifat strategis apakah Bapak-Bapak yang hadir di sini juga diberikan mandat kewenangan untuk mengambil keputusan? Itu satu.

Kedua kemarin kita hadirkan Kepala Bappenas, panglima dan seterusnya dalam rapat sebelumnya. Ada yang menggelitik teman-teman pansus begitu lho, ada institusi atau mitra yang di Komisi terkait kebetulan aparat penegak hukum, itu bertanya bahkan tertawa geli begitu lho, ini kami mitranya Komisi III atau Pansus? Nah di pansus ini adalah lembaga yang ditunjuk mewakili DPR terdiri dari lintas komisi. Persoalan Otsus ini adalah tidak hanya terkait dengan komisi teknis di alat kelengkapan dewan, tetapi di pansus ini ada yang dari Komisi Pendidikan, Ibu Esti, Putra Nababan di pendidikan juga komitmen terhadap kemajuan bidang pendidikan. Kami perlu mengkonfirmasi persoalan-persoalan yang ada di Papua.

Kemudian ada banyak lagi dari PKS Komisi II Pemerintahan Daerah, ini Kementerian Dalam Negeri mengajukan konsep mewakili pemerintah, persoalannya penambahan walaupun hanya dua Pasal tetapi tadi pagi kita menerima baru saja menerima *bundle* resmi dari Majelis Papua, eh maaf Papua Barat yang kurang lebih isinya hampir sama. Seperti halnya anak-anak yang teriak kepada orang tuanya, berharap agar ada uluran perhatian yang lebih begitu. Bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam pulau tidak hanya satu pulau saja, kalau kami mau menggugat di dapil kami, kami bisa juga, cuma kami punya cara tersendiri bagaimana orang tua itu mau mendengarkan omongan kita. Tidak perlu teriak-teriak tapi cukup berbisik pasti didengarkan oleh orang tua kita, dikasih lagi.

Kembali kepada konteks ini, jikalau nanti ada hal-hal yang strategis kami minta Bapak Ibu yang hadir untuk bisa memberikan keterangan. Apakah memiliki mandat penuh begitu?

Saya rasa itu Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Anggota lain?

Silakan dari PKS.

F – PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Teddy Setiadi dari PKS A – 498. Terima kasih atas kesempatannya Pimpinan. Jadi kalau saya sih melihat bahwa persoalan Papua ini adalah



persoalan yang serius, dan ini adalah usulan dari Pemerintah juga. Tanpa mengurangi rasa hormat dari teman-teman dari Dirjen, ataupun nanti yang mewakili Pak Menteri, tapi secara politis ini penting untuk dihadirkan menteri. Kenapa? Karena menteri ini adalah secara tidak langsung merupakan representasi kebijakan yang tertinggillah katakanlah seperti itu. Karena itulah kemudian, saya melihat bahwa kehadiran menteri itu penting, ya barang apa di ujungnya atau kemudian kita lakukan ini adalah bagian dari hal yang semestinya kita lakukan.

Dibeberapa kesempatan komisi saya sepengetahuan saya, saya yang kemudian ketika hal-hal yang serius tidak dihadiri oleh menteri biasanya kita tunda. Mungkin kita juga memahami bahwa kepentingan-kepentingan atau keperluan-keperluan Pak Menteri yang lainnya, namun saya rasa karena ini adalah hal-hal yang memang menyangkut aspek perhatian, dan aspek kemudian juga kepentingan, dan aspek politis kebijakan dan lain sebagainya, memang alangkah baiknya kalau menteri itu juga hadir, dan bisa bertemu di sini. Ya saya tidak kemudian harus kita rapat marathon dengan menteri tersebut, tapi paling tidak kebijakan politisnya bisa kita ambil.

Demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, masih ada lagi pendapat teman-teman, Pak Putra silakan.

F – PDIP (PUTRA NABABAN):

Izin pimpinan Putra Nababan F - PDI Perjuangan terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Pansus, baik yang fisik maupun virtual Jajaran dari Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan.

Saya rasa dalam konteks bahwa Revisi Undang-undang Otsus Jilid II ini menjadi inisiatif dari Pemerintah, kita sudah sepakat. Kami sudah bagi dua grup untuk terjun langsung ke Papua dan Papua Barat, sehingga kalau kita baca presentasi dari Kemenkes dan Kemendikbud, presentasi ini memang hanya berupa data-data yang sudah kami dapat bedanya kami sudah hadir ke sana, dan data ini menjadi tidak hidup. Karena menterinya sebagai *political apointie* dari Presiden yang punya perhatian sangat besar terhadap Papua. Ya saya menggarisbawahi sebagai partai pendukung pemerintah, Presiden Jokowi punya perhatian yang luar biasa terhadap Papua dan Papua Barat.

Sudah sepantasnya menterinya pembantu presiden itu paling tidak hadir kesini, bisa pakai model seperti yang digunakan oleh Bappenas. Hadir setengah jam, satu jam kemudian teknisnya dijawab Dirjennya, atau seperti formatnya Kemendagri hadir *full*, ya *end to end*. Memang menurut saya sinyal-sinyal baik



dari Kemenkes dan Kemendikbud yang tentunya di tonton dan disaksinya secara *live* melalui Youtube dan siaran dari DPR sampai ke Papua. Ini kan mereka melihat, bagaimana komitmen perhatian pemerintah, dan saya tahu Pak Jumeri Pak Dirjen, Mas Menteri sudah beberapa kali ke sana? Betul ya? Kita juga ingin dengar ya bagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu pengalamannya serapannya selama berada di sana, karena kita tidak bicara 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, ya 20 tahun ke depan. Jangan sampai komitmen kita bahwa kita akan berpihak di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan, itu malah ditarik ke bidang yang lain.

Ya kalau kita lihat dari laporan lembaga tertentu, seperti audit lembaga BPK yang akan kami dengar sore ini, mereka itu belum tentu mengedepankan pendidikan. Karena memang saya baca laporan BPK selama 14 sampai 15 tahun terakhir dari auditnya mereka, pendekatan yang akan diberikan adalah infrastruktur. Kalau tidak ada atensi khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan menjadi inisiatif dari pemerintah lalu siapa lagi yang akan mengawal ini?

Jadi saya rasa Pimpinan, dalam hal ini kita justru Pak Komarudin senior saya justru kita harus bantu Pemerintah ini Pak Komar. Jangan sampai nanti salah-salah menterinya tidak datang kita iyaikan, nanti dimarahi presiden kasihan juga Pak Komar. Begitu ya, ini kan sebagai pendukung pemerintah ini Pak, jadi salam konteks ini saya justru mau mengingatkan Pak Jumeri dan Ibu dari Kemenkes. Ya jangan sampai nanti dikira komitmennya geser, karena yang hadir diwakili, bahkan belum tentu bisa memenuhi apa yang disampaikan tadi, seperti Dubes LB (Luar Biasa) berkuasa penuh, atau hanya membacakan data-data yang ada dipresentasi. Saya sudah baca ini Pak Jumeri data-data ini, data ini juga saya dapatkan di Papua Barat, tapi data ini menjadi tidak hidup karena narasinya tidak ada, ya narasinya tidak dapat.

Saya rasa itu ya Pimpinan yang bisa saya sampaikan, tentunya kita menghormati kehadiran dari Ibu dan Bapak yang ada disini, tapi memang ini adalah lembaga politik ya dan yang ditunjuk oleh Presiden sebagai pembantunya secara politik adalah para menteri. Saya rasa itu Pimpinan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Terima kasih Merdeka!

Oke ya satu-satu, ya Pak Gaus dulu baru Pak Sodik. Silakan.



F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Siap Pimpinan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya pertama saya mohon maaf kepada Pak Ketua yang saya banggakan, pada hari ini saya tidak bisa hadir secara fisik kebetulan sedang di Dapil melaksanakan tugas kenegaraan. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan beserta seluruh anggota yang hadir secara fisik. Minimal apa yang disampaikan oleh Pak Agung sebagai Pimpinan dan juga Ketua Pak Komarudin dan juga sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, saya memang punya perhatian khusus terhadap Papua dan Papua Barat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Putra Nababan, kita memang sangat luar biasa perhatian, anggota Pansus kita sangat serius dalam menyikapi ini. Sehingga agenda kerja Pansus saya lihat sangat luar biasa, baru saja Pimpinan diresmikan langsung melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mewujudkan harapan daripada Pemerintah. Hal ini juga sudah dikatakan bahwa RUU ini adalah merupakan hasil inisiatif pemerintah, tadi dikatakan bahwa presiden punya perhatian yang sangat amat luar biasa kepada tanah Papua dan Papua Barat dan kita juga harus paham juga bahwa kondisi RUU ini juga menjadi persoalan bagi masyarakat, sahabat kita di Papua. Oleh karena ini harus diseriusi, jangan hanya sekedar kehadiran ini hanya oleh Dirjen dan lain sebagainya, harusnya dinampakan dari sisi pemerintah terkait keseriusan itu, keseriusan itu adalah menghadirkan menteri yang berfokus adalah menteri saya minta tidak mendelegasikan kepada Dirjen, ini adalah sebagai, sebagaimana dikatakan tadi kita ini lembaga politik dan juga ini didengar dan disorot oleh berbagai elemen masyarakat, seriuskah DPR bersama Pemerintah terhadap persoalan ini. Kalau seandainya hanya Dirjen sebagaimana dikatakan oleh Pak Putra Nababan tadi apa-apa yang dipresentasikan semuanya sudah ada pada kami ketika kami berada di Papua.

Oleh karena itu saya memang berharap untuk menampakkan keseriusan DPR bersama Pemerintah, apalagi Pak Presiden sudah betul perhatiannya terhadap dua provinsi ini, dan ini juga sebagai supaya menggugah hati kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, memang betul bahwa DPR bersama Pemerintah sangat serius.

Oleh karena itu saya sangat berharap kepada Pimpinan, yang hadir itu harus menterinya, karena apa? Keputusan yang dibuat oleh undang-undang, RUU atau Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua ini kan sudah dianggarkan masalah pendidikan ini 70% dan melebihi dari Undang-Undang Dasar, ini maksudnya apa? Dalam rangka menciptakan *role strain* sumber daya manusia, begitu juga keinginan bidang kesehatan melebihi dari aturan-aturan apa yang ditetapkan oleh APBN pada kabupaten/kota dan provinsi, ternyata



dalam pelaksanaannya, saya sangat prihatin, saya keluar di berbagai *mass media* tentang Papua ini berkaitan dengan masalah Pendidikan dan Kesehatan.

Saya sangat miris, sangat prihatin kenapa anggaran pendidikan yang begitu besar, tetapi tidak bisa terealisasi melebihi dari 5%. Begitu juga mengenai kesehatan, yang ditetapkan 17% tetapi jauh panggang daripada api. Tentu ini adalah persoalan-persoalan pertanggungjawaban menteri yang bertugas untuk melaksanakan ini, tidak bisa Dirjen ini hanya perpanjangan tangan, apa yang diputuskan oleh kementerian inilah yang akan dilakukan.

Oleh karena itu saya sependapat dengan kawan-kawan agar secara politis, secara berbagai hal kita bisa menganggarkan tinggi, kita anggarkan ini tetapi sangat tidak masuk akal Menkes dalam pencairannya hanya 5%, tentu ini yang bisa menjawab adalah dua menteri yang sangat bertanggungjawab ini. Oleh karena itu saya berharap Pimpinan mohon saya saling mendukung agar dalam RDP ini kita hadirkan sosok orang yang punya kebijakannya itu yaitu adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Saya rasa itu Pimpinan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum ssalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Sodik silakan.

F – P. GERINDRA (Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,,

Pak Ketua beserta para Wakil Ketua yang saya banggakan.
Kawan-kawan, khususnya yang sudah bicara Uda Gaus dan Bang Nababan.

Pertama Pak Ketua tadi saya ingin juga ketika mudah-mudahan berkesinambungan, mendapatkan penjelasan dari Wakil Ketua Mas Agung bahwa ada seorang pejabat pemerintah yang mempertanyakan kehadirannya di Panitia Pansus ini. Karena merasa bukan komisinya, berarti jika ada seorang pejabat tidak bisa membedakan kehadirannya di komisi dan kehadirannya di pansus. Saya kira ini harus mengikuti tes wawasan kebangsaan lagi jika ada pejabat yang tidak paham terhadap hal itu.



Yang kedua Pak Ketua, saya sudah sangat setuju dengan Pimpinan juga teman-teman tadi, kehadiran menteri-menteri di Pansus ini, tapi mohon juga maklum sekarang menteri-menteri sedang membahas draf APBN, dan juga situasi Covid-19 masih membuat kita ada kendala-kendala pertemuan, dan jangan lupa kita sudah menghabiskan waktu ini, sekarang ini sudah hampir lebih dari 30 menit, karena itu maka segera diambil keputusan apakah menteri dihadirkan atau tidak?

Bagi saya sendiri tadinya berpikiran bahwa pertemuan ini tidak apa-apa tanpa menteri, kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari mereka, dan jika ada pertanyaan dan permintaan kita yang tidak terjawab oleh menteri maka kita undang lagi dan pada pertemuan kedua tidak bisa tidak hadir, harus hadir begitu. bisa melihat bahwa kita sudah membuang-buang waktu untuk diskusi ini atau tidak. Kalau tidak kita putuskan saja, kalau iya kita manfaatkan untuk mendengarkan penjelasan mereka dengan catatan jika ada pertanyaan dan permintaan kita yang tidak terjawab oleh Dirjen maka kita undang lagi menteri dan tidak bisa tidak harus hadir pada pertemuan kedua nanti.

Demikian Pak Ketua terima kasih, saya Sodik Mujahid Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Barat I.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Agun, senior silakan.

F – P. GOLKAR (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc. IP., M.Si.):

Pak Agun Ketua virtual.

Ya saya mulai Pak Ketua ya.

Yang terhormat Pimpinan Pansus dan jajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan.

Mohon maaf saya mengikuti secara virtual saja, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan rapat kali ini, yang pertama karena forum ini adalah forum Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah Pak, maka saya ingin menyampaikan dalam forum ini utamanya kepada pimpinan juga pada jajaran pemerintah, yang pertama respons saya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Agung yaitu soal posisi Pansus. Seingat saya, setahu saya berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Susduk kita, apabila pansus mengundang pihak-pihak dalam membahas, menyelesaikan

✓

1

tugas utamanya penyelesaian rangkaian yang harus dibahas di pansus, itu tidak lagi diperlukan konfirmasi dan detail dari komisi terkait maupun dari pemerintahan terkait Pak, dari kementerian terkait tidak ada dasar kewenangan tersebut. Yang namanya Pansus memiliki kewenangan penuh untuk mengambil siapapun, yang didasarkan atas kesepakatan bersama bahwa ada hal-hal yang harus kita diskusikan. Perbedaannya adalah apabila memang substansi itu dibahas oleh komisi, itu memang ada konfirmasi dari mitra kerja komisi yang terkait, kalau memang materi bahasannya dilakukan oleh komisi. Ini beda, ini bukan komisi Pak, ini pansus, yang namanya pansus bisa mengundang siapapun dianggap relevan untuk dihadirkan guna memecahkan persoalan yang tumbuh di dalam pembahasan pansus itu sendiri.

Jadi buat saya sangat memprihatinkan, saya masih memprihatinkan masa apabila masyarakat Pimpinan komisi yang menanyakan itu. Saya juga sangat prihatin apabila ada pihak pemerintah yang menanyakan tentang itu, untuk hadir di pansus minta konfirmasi dari komisi terkait, menyedihkan ! Itu yang pertama Pak.

Yang kedua, forum ini forum rapat kerja, forum rapat kerja itu sudah diatur dalam undang-undang atas mandat dalam peraturan tata tertib, dan juga atas mandat undang-undang. Yang ujungnya berasal tadi bermula dari Pasal 20 Undang-Undang Dasar bahwa setiap undang-undang itu dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah, bahwa tegas di sana dikatakan bersama dengan Presiden.

Jadi kewenangan pembuatan undang-undang itu antara lembaga DPR dan lembaga kepresidenan. Nah presiden dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 17 dibantu para menteri, sehingga kehadiran para menteri di lembaga pansus itu mewakili presiden. Jadi sudah turun derajatnya yang harusnya presiden hadir di DPR, tapi karena mandat konstitusi dia punya pembantu untuk setiap urusan pemerintahan namanya menteri. Maka undang-undang mengatur, tata tertib mengatur bahwa rapat kerja itu wajib dihadiri oleh alat kelengkapan dewan yang menangani bersama dengan menteri. Untuk apa? Rapat kerja ini kewenangannya mengambil keputusan, setelah rapat keputusan diambil dalam kerja ini, selanjutnya nanti akan dibahas lebih lanjut dalam panja-panja, yang panja-panja itu mengambil keputusan melanjutkan apa yang diputuskan secara lebih operasional dari apa yang diputuskan oleh rapat kerja. Dan bisa diteruskan sampai Rapat Timsin, Timus dan seterusnya sampai naik lagi kembali ke rapat panja diambil keputusan, dilaporkan kembali kepada rapat kerja sebagai forum Pengambilan Keputusan Tingkat I, baru dihadirkan ke pengambilan keputusan Tingkat II di Paripurna.

Jadi Pak Ketua tidak bisa jangan semua forum pengambilan keputusan dari Presiden yang sudah didelegasikan kepada menteri, lalu didelegasikan lagi kepada *level* di bawahnya tidak bisa Pak. Jadi ini rapat harus ditunda, harus ditunda tidak ada dasar hukumnya Pak, jadi harus ada aturan hukumnya, mohon

maaf dengan pihak pemerintah, tolong berikan pengetahuan penjelasan kepada para menteri yang diundang.

Wassalamu 'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik terima kasih senior, rekan-rekan pansus baik di virtual maupun hadir di ruangan ini. Ini kita bukan berbicara kehormatan orang per orang, kita bicara soal kehormatan konstitusi ya. Jadi perintah Undang-Undang Dasar sudah jelaskan panjang lebar tadi, tidak perlu saya uraikan lagi, dengan segala hormat kepada perwakilan dari Kementerian Pendidikan maupun Kesehatan, sampaikan kepada para menteri untuk hadir diketerwakilan dari presiden itu sudah serahkan ke menteri jangan menteri serahkan lagi ke bawah. Untuk menjaga wibawa kita bersama, baik Pemerintah maupun DPR ya kehadiran menteri itu juga menjaga kewibawaan presiden itu.

Karena itu rapat tidak saya buka, kita tunda rapat sampai kehadiran menteri diruangan ini. Kami punya waktu tanggal 7 siang, itu bisa kita rapat ya, dan Bapak-Bapak tolong sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan maupun Menteri Kesehatan, ini dua hal yang sangat penting di dalam otonomi khusus ditekankan di Otsus itu ada tiga hal seperti yang tadi saya sampaikan, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat.

Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami kepada Bapak-Bapak, tapi tolong Pak Menterinya harus hadir di sini. Karena kita bicara soal kebijakan, ada hal-hal yang nanti kita akan sampaikan, kalau masalah ini tidak bisa kira-kira kebijakan menterinya seperti apa, kan tidak mungkin Bapak-Bapak menjawab itu. Oleh karena itu rapat ini saya skors sampai kita tunggu Pak Menteri untuk kita rapat kembali.



Jadi hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB siang, Bapak-Bapak sampaikan hari Senin, 7 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB siang, kehadiran para menteri itu ada kaitan dengan kecepatan pengesahan undang-undang ini, dan ini ada kaitan dengan dana 2,5% dalam APBD. Saya kira ini kalau terlambat mohon maaf pak menteri-menteri akan disemprot sama Presiden. Karena Pak Presiden juga berkepentingan ini segera disahkan. Oleh karena itu rapat saya nyatakan ditutup.



(RAPAT DITUTUP PUKUL : 11.25 WIB)

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

JAKARTA, 02 JUNI 2021

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**



**ENDAH SRI LESTARI, S.H., M.Si.
NIP. 197104031996032001**